

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau

Dari catatan sejarah dapat diungkap bahwa Instansi Sosial lahir dua hari setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, bersamaan dengan lahirnya beberapa instansi. Pada mulanya instansi sosial dinamakan Kementrian Sosial, yang kemudian diganti dengan nama Djawatan. Tahun 1947, dengan keputusan Presiden RI no. 44 Tahun 1947 Tentang Susunan Umum Pemerintahan dan Departemen, kemudian diubah menjadi Departemen Sosial sampai dengan tanggal 26 Oktober 1999. Sejak berdiri sampai dengan perkembangan terakhir, instansi sosial memegang peranan penting, mulai dari hal mengatasi masalah sosial disaat perang, cacat, korban kerusuhan, dan pada saat mempertahankan kemerdekaan. Selain hal itu juga pelayanan dapur umur, yang menjadi embrio lahirnya Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada tanggal 20 Desember 1949 (Arsip Dinas Sosial 2014).

Kemudian tugas-tugas Instansi Sosial dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta melanjutkan/pengembalian orang terlantar. Dalam pembangunan nasional selama ini, masalah sosial yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI No. 24/HUK/1997 Tentang Sistem Pembangunan Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua hal, yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdiri dari 21 jenis serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial (Arsip Dinas Sosial 2014).

Provinsi Riau berada dalam kawasan kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Indonesia, *Malaysia, Singapura growth Triangel* (IMS-GT). Posisi penting tersebut akan terus disandang oleh Provinsi Riau, seiring dengan perkembangna pasar bebas ASEAN pada tahun 2003 dan pasar bebas Asia Pasific pada tahun 2020 mendatang. Kemajuan pembangunan kawasan-kawasan industri memang menampilkan hasil yang menggembirakan. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak sosial serta kesenjangan dalam masyarakat (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

Dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial, keberadaan Dinas Sosial Provinsi Riau telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di Provinsi Riau. Dinas Sosial telah menargetkan penanganan PMKS sebanyak 34.602 jiwa, dan telah dapat ditangani sampai tahun 1989/1999 adalah sebanyak 23.671 jiwa. Adapun pembinaan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebanyak 570 Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat/ relawan Sosial dan 546 organisasi sosial (Karang Taruna /Orsos).Penanganan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Sosial), Pemda/Instansi terkait dan masyarakat (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

Selain daripada itu, salah satu pembinaan yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Departemen Sosial di Provinsi Riau adalah melalui pendekatan

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan berbagai jenis dan kerajinan yang tersebar di 12 Kabupaten di Provinsi Riau.

B. Sejarah berdirinya Dinas Sosial Provinsi Riau

Sebelum ibukota Provinsi Riau ditetapkan di Pekanbaru, Ibukota Provinsi ini terletak di Tanjung Pinang. Pada saat itu semua Jawatan atau Dinas Tingkat I berpusat di Tanjung Pinang, termasuk juga Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau sewaktu berpusat di Tanjung Pinang bernama Jawatan Sosial yang didirikan pada tahun 1961. Sewaktu Ibukota Provinsi Riau dipindahkan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, termasuk Jawatan Sosial pada Tahun 1963. Dan sekarang berubah menjadi Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau yang berpusat di Jalan Jendral Sudirman No. 239 Pekanbaru.

Tahun 1974 Jawatan Sosial diubah namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau. Pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau dilakukan PT. GIAM RIAU, mulai tanggal 10 November 1975 sampai 10 Juni 1976, dan diresmikan pemakaiannya pada tanggal 25 Juni 1976 dan Menteri Sosial RI yang pada waktu itu dijabat oleh HMS. Mentareja SH, sedangkan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau pada saat itu adalah H. Abdul Karim Said (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

Krisis moneter yang terjadi bulan Juli 1997, pemerintahan menghadapi masalah yang kian besar, masalah kemiskinan dan pengangguran yang

menuntut pemerintahan untuk bekerja keras. Gejolak ini membawa implikasi dengan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1988 yang menghasilkan 12 ketetapan. Kabinet Reformasi melaksanakan kegiatannya segera setelah pemerintahan baru terbentuk. Berbagai Departemen dituntut untuk memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat. Salah satu bentuk dari kerja keras ini antara lain memunculkan program yang terkenal dengan istilah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam era reformasi Departemen Sosial menetapkan 3 program pokok, yakni Program Penyelamatan, Reguler dan Pemberdayaan. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER, JURDIL, pada tanggal 7 Juli 1999 yang dapat berjalan lancar (Arsip Dinas Sosial 2014).

Pembentukan MPR RI dan DPR RI. Kemudian dilaksanakan Sidang Umum MPR dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999 yang antara lain memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terpilihnya Prof. DR. Amien Rais sebagai Ketua MPR, Ir. Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, KH. Abdurachman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden. Tanggal 26 Oktober 1999, pengumuman susunan kabinet Persatuan Nasional yang terdiri dari 35 Menteri sebagai pembantu Presiden, dan Departemen Sosial tidak termasuk dalam susunan kabinet. Pada tanggal 26 oktober 1999, Sekretaris Jenderal Departemen Sosial diwawancarai oleh TVRI, yang menyatakan bahwa Departemen Sosial berada pada Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengawasan Kemiskinan. Pada tanggal

26 Oktober 1999 para Kakanwil dan Eselon II di Pusat, diundang oleh Bapak Sekjen guna perpisahan dengan Ibu Menteri Sosial Prof. DR. Ir. Yustika S Baharsjah, M.Sc. dan penyampaian ketidakberadaan Departemen Sosial dan penyusunan Kabinet tersebut (Arsip Dinas Sosial 2014).

Pada tanggal 27 Oktober 1999 para Esselon I dan para pakar sosial diterima oleh Presiden RI guna menyampaikan agar Departemen Sosial tetap eksis. Namun Bapak Presiden tetap pada pendiriannya dan aspirasi tersebut diteruskan melalui Ketua DPR RI , yang kemudian para Kakanwil di daerah dapat menyampiakannya pada tanggal 28 Oktober 1999 pagi hari sebelum pukul 12.00 WIB. Pada tanggal 28 Oktober 1999 pukul 08.15, seluruh karyawan/karyawati Departemen Sosial, Depsos Kodya Pekanbaru, UPT, menyampaikan aspirasinya ke DPR Provinsi Riau tentang beberapa hal, kemudian dilanjutkan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI pusat agar Departemen Sosial tetap eksis (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

DPR RI menjanjikan akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden RI ,dan direncanakan pertemuan DPR RI dengan Presiden adalah tanggal 15 November 1999. Sidang paripurna DPR RI baru dapat dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999 dengan acara pokok mendengarkan penjelasan Presiden mengenai likuidasi Presiden tetap berpendirian bahwa Departemen Sosial dan Departemen Penerangan tidak perlu ada dalam susunan Kabinet Persatuan Nasional.

Dengan surat Sekretaris Jendral Departemen Sosial tanggal 30 Oktober 1999 Nomor : K/HUK/45 bahwa para Kakanwil Departemen Sosial tetap

melaksanakan kegiatan sampai dengan Maret 1999. Sebagai solusi alternatif, untuk tingkat pusat tugas pokok dan fungsi Departemen Sosial dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Masalah Kemasyarakatan dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI), sedangkan ditingkat daerah Tingkat I, diperbantukan PEMDA TINGKAT I. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 1999 Tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Sosial RI nomor K/515/SJ/XI/1999, Kepada Gubernur KDH Tk. I se-Indonesia, Tanggal 26 November 1999, perihal Permohonan untuk tetap memfungsikan Kanwil Depsos sampai dengan akhir Maret Tahun 2000 (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

Dinas Sosial Provinsi Riau mengalami perubahan nama sebagai berikut:

1. Jawatan Sosial (1961)
2. Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau (1974)
3. Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (1999)
4. Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau (2001)
5. Dinas Sosial Provinsi Riau (20 februari 2009, sesuai dengan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 9 tahun 2008

Pada tahun 1999 Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi Riau menjadi Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Berdasarkan Perda No. 31 tahun 2001 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau berubah menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau. Dengan dikeluarkannya Perda tersebut panti sosial dipimpin oleh seorang Kepala tanpa jabatan struktural. Berdasarkan Perda No. 9 tahun 2008 Badan Kesejahteraan Sosial Provinsi

Riau berubah menjadi Dinas Sosial Provinsi Riau. Sedangkan panti berdasarkan Pergub no. 32 dan Pergub No. 50 tahun 2009 menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau berjumlah 4 panti yang terdiri dari Pelayanan Sosial Bina Remaja, Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk, Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah, Pelayanan Sosial Karya Wanita (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau).

C. Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

1. Kondisi Sosial Provinsi Riau

Bidang sosial memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya dalam upaya membangun masyarakat Provinsi Riau. Bidang sosial mempengaruhi dan dampak terhadap perkembangan di bidang lainnya. Pembangunan bidang sosial merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kaulitas SDM masyarakat Provinsi Riau, sehingga mampu menjalankan tugas kehidupannya secara mandiri. Dalam hal ini, pembangunan bidang sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

Pemerintah Provinsi Riau bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan melaksanakan berbagai program / kegiatan bidang sosial dan bidang lainnya yang berkaitan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun kota.

2. Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau terdiri dari :

- a. Sekretariat yang memberikan Pelayanan umum dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan, dan bina program;
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial yang memberikan pelayanan Komunitas Adat Terpencil, Fakir Miskin, Masyarakat, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;
- c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial memberikan pelayanan korban bencana, siaga penanggulangan bencana, korban tindak kekerasan, pekerja migrant bermasalah terlantar, orang terlantar, pengawasan, perizinan dan rekomendasi penyelenggaraan sumber dana sosial serta jaminan sosial;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memberikan pelayanan kepada penyandang cacat, anak cacat, anak nakal, anak terlantar, lanjut usia, korban penyalahgunaan NAPZA, dan bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan;
- e. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh Sosial memberikan pelayanan kepada organisasi sosial, karang taruna, panti sosial, tenaga

kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat, Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru. Pelayanan Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja Rumbai Pekanbaru. Pelayanan Sosial melalui Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Sosial Marsudi Putera “Tengku Yuk” Pekanbaru Pelayanan sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Karya Wanita Pekanbaru. Sistem Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau menggunakan pola pelayanan dalam panti maupun luar panti. Sistem pelayanan dalam panti dirujuk dari peningkatan kualitas dan pembentukan sikap dan perilaku yang memerlukan waktu yang cukup lama (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

D. Pimpinan

Nama-nama Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :

1. M. Soelaiman Kramadibrata (1950-1963)
2. Ischak Martawidjaya (1964-1966)
3. Karma Ritonga (1967-1974)
4. H. Abdul Karim Said (1975-1980)
5. H. Masnoer(1981-1982)
6. Drs . Sartono Wirjosoemarno(1982-1989)
7. Drs. Soeranto (1989 – 1994)
8. Drs. Hanafiah Hasan Mustofa (1994- 1997)
9. Drs. Iwang Dihwan (1997- 1997)

10. Drs . Rustam Effendi, M.Si.(1998-2004)
 11. Drs. Tengku Fadil Ja'afar (2004-2005)
 12. H. Asral Rachman (2005-2006)
 13. DR. Wan Darlis Ilyas, S.H., M.H. (2006-2007)
 14. H. Humizry H. (2007)
 15. Drs. R. Indra Bangsawan (2007-2008)
 16. Drs. Delfi Muktar (2008)
 17. H.R. Lukman Mat (2008-2010).
 18. Drs. Zaini Ismail, M.Si (2010-2012)
 19. Drs. Said Saqlul Amri, ME, Msi (2012-2013)
 20. Mizuar Ependi, SH (2013-Sekarang).
- (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

E. Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau

1. Visi

”Terwujudnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi serta Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang didukung oleh melembaganya nilai, jiwa, semangat kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial ”

Makna dari visi tersebut adalah :

a. Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(MKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah meningkatnya keberfungsian sosial PMKS dan PSKS sehingga mereka mampu menolong, mengembangkan dirinya sendiri, terpeliharanya

kelembagaan sosial, berperan seta dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial, dan mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungan sosialnya.

- b. Melembaganya nilai, jiwa, semangat kepahlawanan, dan setiakawanan sosial.

Adalah untuk menanamkan kepada PMKS dan PSKS bahwa patriotisme, kejuangan, dan pantang menyerah serta kebersamaan dan kekeluargaan sebagai anak bangsa merupakan nilai dasar dari pelayanan sosial yang mereka terima. Nilai ini terpatri dalam diri PMKS sebagai ciri bangsa Indonesia (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

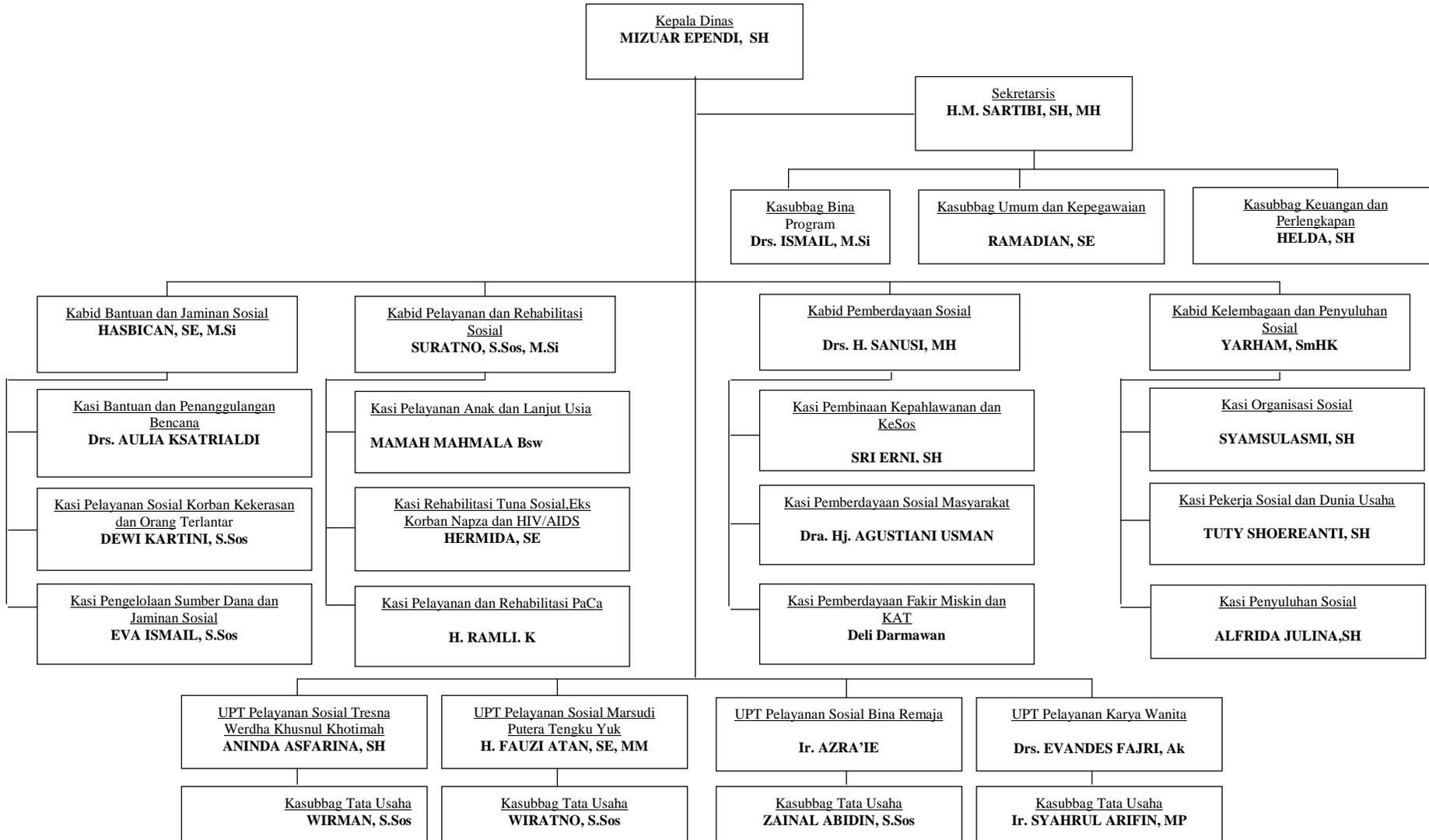
2. Misi

Untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, maka Dinas Sosial Provinsi Riau menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, pegawai, perencanaan, serta kerjama program bidang sosial.
- b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup PMKS melalui program pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS.
- d. Meningkatkan kesadaran hidup berkeluarga, bermasyarakat dan berorganisasi yang harmonis melalui nilai-nilai kelembagaan dan penyuluhan sosial.

- e. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial melalui bantuan dan jaminan sosial.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan sosial melalui panti (Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).

F. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau



G. Jumlah Pegawai Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau

1. Rekapitulasi jumlah PNS menurut jenis kelamin dan golongan

No	Jenis Kelamin	Jumlah PNS Berdasarkan																Jumlah
		Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		a	b	C	d	a	B	c	d	a	B	C	d	A	b	C	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	LAKI-LAKI	2	3	-	4	8	10	1	5	5	22	13	17	7	8	1	-	106
2	PEREMPUAN	-	-	-	-	3	-	2	2	3	29	8	22	1	-	-	-	70
	TOTAL	2	3	0	4	11	10	3	7	8	51	21	39	8	8	1	0	176

2. Rekapitulasi jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

No	Jenis kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-III	S-I	S-2	S-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Laki-laki	2	6	33	18	36	11	-	106
2	Perempuan	-	-	31	9	29	1	-	70
	Total	2	6	64	27	65	12	-	176

3. Rekapitulasi menurut jenis kelamin dan diklat penjenjangan

No	Jenis kelamin	Diklat Penjenjangan				Jumlah
		ADUM/ PIM IV	SPAMA/ PIM III	SPAMEN/ PIM II	SPATI/ PIM I	
1	2	3	4	5	6	7
1	Laki-laki	29	16	1	-	46
2	Perempuan	17	7	-	-	24
	Total	46	23	1	0	70

4. Rekapitulasi menurut jenis kelamin dan jumlah eselon

No	Jenis kelamin	Jumlah Pejabat Eselon					Jumlah
		I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laki-Laki	-	1	8	9	-	18
2	Perempuan	-	-	1	10	-	11
	Total	0	1	9	19	0	29

(Arsip Dinas Sosial Provinsi Riau 2014).